

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**

###### **2.1.1.1 Definisi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang penilaian maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terintegrasi pada Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian intern dalam suatu entitas merupakan faktor penting yang menentukan keandalan pelaporan keuangan yang dihasilkan.

Menurut Indriani & Siswanto, (2023:103), Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan.

Selanjutnya, menurut Huda & Octovian (2025:112) bahwa SPIP ialah untuk menjelaskan informasi yang berkualitas, organisasi yang perlu mengefektifkan pengendalian internal dengan cara memastikan keandalan data akuntansi dan mendorong efisien dalam pelaksanaan kebijakan manajemen.

Menurut Committee Of Sponsoring Organizations (COSO), sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang di pengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan seluruh karyawan yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai melalui efektivitas dan efisien operasional, keandalan laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Indriani & Siswantoro (2023:145) menyebutkan bahwa sistem pengendalian intern yaitu proses yang bersifat internal terhadap tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan serta seluruh pegawai. Sementara itu, menurut Raden Suhartono (2019:119), sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah.

Dengan demikian, SPIP adalah mekanisme pengendalian yang terintegrasi dan berkesinambungan untuk menjamin bahwa setiap proses pemerintahan berjalan secara efektif, efisien, transparan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 2.1.1.2 Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memiliki empat sasaran utama yang ingin di capai:

1. Terwujudnya kegiatan yang efektif dan efisien

Yaitu Ketika pelaksanaan program dan aktivitas instansi pemerintah berjalan sesuai rencana serta menghasilkan *output* yang sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas mengacu pada tercapainya target Sedangkan efisien menekankan pada penggunaan sumber daya secara optimal untuk menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas dengan biaya yang wajar.

2. Tersedianya laporan keuangan yang andal.

Informasi keuangan yang disajikan pemerintah harus akurat, lengkap, dan mencerminkan komisi yang sebenarnya agar data dijadikan dasar dalam pengambilan Keputusan yang tepat. Ketidakakuratan laporan dapat menimbulkan kesalahan dalam kebijakan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah.

3. Terjaminya pengamanan aset negara

Aset yang dibiayai dari uang publik harus dilindungi dari risiko penyalahgunaan, kehilangan, atau manipulasi. Pengendalian terhadap aset ini dapat dilakukan melalui pembatasan akses, pengawasan internal, pencatatan yang tertib, serta penerapan prosedur keamanan fisik dan administratif.

#### 4. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

Setiap kegiatan atau transaksi pemerintah wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum, kebijakan, serta prosedur yang berlaku. Pelanggaran terhadap aturan dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan kerugian bagi instansi maupun Masyarakat.

Keempat tujuan tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena secara bersama-sama mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

### **2.1.1.3 Komponen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan diperkuat oleh Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021, ada lima komponen yaitu:

#### **A. Lingkungan Pengendalian**

##### 1) Penegakan Integritas dan Nilai Etika

Nilai ini penting dalam membangun citra positif lembaga di mata masyarakat, sehingga kepercayaan publik terhadap kinerja instansi dapat meningkat. Untuk mewujudkan hal tersebut, telah disusun sejumlah peraturan yang menjadi pedoman dalam penerapan nilai integritas dan etika.

Selain itu, kementerian Hukum dan Ham memberikan kemudahan bagi pegawai dalam melaporkan penerimaan gratifikasi melalui dua mekanisme, yaitu secara manual menggunakan formulir yang disediakan oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pusat, serta secara daring

melalui laman *upg.kemenkumham.go.id*. Fasilitas pelaporan *online* ini diharapkan dapat mendorong pegawai untuk lebih aktif dan transparan dalam menyampaikan laporan gratifikasi yang terjadi di lingkungan kerja.

## 2) Komitmen terhadap Kompetensi

Komitmen terhadap kompetensi mencerminkan upaya organisasi dalam memastikan bahwa setiap pegawai memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pekerjaannya. Peningkatan kompetensi ini dilakukan melalui berbagai program pengembangan, seperti pelatihan, bimbingan teknis, dan pembekalan kerja yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing individu. Langkah ini penting untuk menjaga profesionalisme, meningkatkan kinerja, serta memastikan pelaksana kegiatan organisasi berjalan efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 3) Kepemimpinan yang Kondusif

Kepemimpinan yang kondusif merupakan faktor penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang efektif dan harmonis. Pemimpin memiliki tanggung jawab untuk mengambil Keputusan yang tepat serta memberikan yang jelas kepada seluruh pegawai agar pelaksanaan tugas yang di mana ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan organisasi. Dalam konteks pengelolaan aset atau sumber daya organisasi, pemimpin berperan sebagai pengaruh dan pengendali utama memastikan setiap kegiatan operasional dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku. Kepemimpinan yang baik ini akan mendorong koordinasi yang solid, serta

meningkatkan motivasi kerja pegawai, lalu memperkuat budaya kepatuhan dan akuntabilitas di lingkungan kerja.

4) Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan

Organisasi yang baik harus disusun berdasarkan kebutuhan dan karakteristik kegiatan yang dijalankan oleh suatu instansi. Dalam konteks pengelolaan aset atau sumber daya, pembentukan struktur organisasi yang tepat bertujuan untuk memastikan adanya pembagian tugas, tanggung jawab serta wewenang yang jelas di setiap tingkatan.

Dengan demikian, proses pengelolaan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pengelolaan aset biasanya diintegrasikan dalam unit atau bagian yang menangani urusan keuangan dan administrasi agar koordinasi antar bagian lebih optimal serta pemanfaatan sumber daya dapat dilakukan secara maksimal.

5) Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab merupakan Langkah penting dalam memastikan kegiatan organisasi berjalan efektif dan terkoordinasi. Melalui pendelegasian, sehingga pimpinan memberikan kepercayaan kepada pejabat atau pegawai tertentu untuk melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Hal ini bertujuan agar proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan operasional dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Selain itu, pembagian wewenang yang jelas juga membantu menciptakan akuntabilitas individu dalam

setiap tingkatan organisasi, sehingga setiap pegawai memahami peran dan tanggung jawabnya dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

6) **Pewujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah**

Aparat pengawasan intern pemerintah memiliki peran strategis dalam memastikan kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui fungsi pengawasan dan pemeriksaan, aparat intern berupaya menilai efektivitas pengelolaan sumber daya, termasuk dalam hal pengelolaan aset negara. Pengawasan ini tidak hanya bertujuan untuk menemukan dan mencegah terjadinya penyimpangan, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas tata Kelola serta memperkuat sistem pengendalian internal di lingkungan instansi pemerintah.

**B. Penilaian Risiko**

1) **Tujuan Instansi Pemerintah dan Tujuan pada Tingkatan kegiatan**

Setiap instansi pemerintah menetapkan tujuan yang terarah agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan efisien dan selaras dengan visi organisasi. Dalam pengelolaan aset atau sumber daya, pimpinan memiliki peran penting dalam memberikan pedoman yang jelas mengenai prosedur pelaksanaan kegiatan, termasuk tata cara penanganan permintaan atau penggunaan aset. Arahan tersebut diperlukan agar seluruh kegiatan operasional dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

## 2) Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko

Identifikasi dan analisis risiko merupakan Langkah penting dalam memastikan pelaksanaan kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana dan bebas dari potensi gangguan yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Melalui proses ini, organisasi dapat mengenali berbagai kemungkinan risiko yang muncul, baik dari faktor internal maupun eksternal, serta menilai Tingkat dampaknya terhadap kegiatan operasional. Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian, sehingga hasilnya dapat dijadikan dasar untuk menentukan tindakan perbaikan maupun pencegahan agar pengelolaan sumber daya organisasi menjadi lebih efektif dan akuntabel.

### **C. Kegiatan Pengendalian**

#### 1) Pembinaan Sumber Daya Manusia

Pembinaan sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam menciptakan aparatur yang profesional dan berintegritas. Namun, dalam pelaksanaannya sering kali masih terdapat keterbatasan, seperti kurangnya pelatihan atau pembinaan yang berfokus pada penyelarasan antara tugas harian pegawai dengan tujuan strategis organisasi. Kondisi ini dapat berdampak pada kurang optimalnya kinerja dan efektivitas pelaksanaan kegiatan, sehingga diperlukan peningkatan program pelatihan yang terarah dan berkelanjutan agar pegawai mampu bekerja sesuai visi dan misi instansi.

## 2) Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi

Pengendalian terhadap sistem informasi merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan pengelolaan aset dan data organisasi berjalan dengan aman, andal, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengendalian ini dilakukan melalui penerapan sistem informasi yang terintegrasi dan didukung oleh kebijakan keamanan data, pengaturan hak akses, serta pemantauan terhadap pengembangan dan perubahan aplikasi. Selain itu, pengelolaan perangkat lunak dan pemisahan tugas juga menjadi bagian dari upaya untuk menjaga integritas dan keandalan sistem. Dalam praktiknya, organisasi biasanya memanfaatkan berbagai aplikasi manajemen aset yang berfungsi untuk mencatat, memantau, serta mengendalikan proses administrasi dan akuntansi barang milik negara secara lebih efisien dan transparan.

## 3) Pengendalian Fisik atas Aset

Pengendalian fisik terhadap aset dilakukan untuk memastikan keamanan dan ketertiban dalam pengelolaan barang milik organisasi. Salah satu langkah yang diterapkan adalah pemberian kode identifikasi unik pada setiap aset guna memudahkan proses pencatatan inventaris secara rinci pada setiap ruangan agar keberadaan dan kondisi aset dapat terpantau dengan baik. Untuk aset bergerak seperti kendaraan dinas, biasanya digunakan sistem penandaan berupa *barcode* atau label khusus yang berfungsi mempermudah proses identifikasi, pemantauan, serta pengendalian penggunaan aset secara efisien dan akuntabel.

#### 4) Pemisahan Fungsi

Pemisahan fungsi merupakan salah satu prinsip penting dalam sistem pengendalian internal yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan maupun penyalahgunaan wewenang. Dalam penerapannya, setiap bagian atau pegawai memiliki tanggung jawab dan kewenangan yang berbeda sesuai dengan peran masing-masing. Dalam konteks pengelolaan aset, pemisahan fungsi dilakukan dengan menetapkan sistem pencatatan dan pengawasan yang terstruktur, seperti pemberian kode identifikasi unik pada setiap aset, pembuatan daftar inventaris yang terperinci per ruangan, serta penggunaan *barcode* pada aset bergerak. Langkah ini membantu memastikan adanya pengendalian yang efektif, akurasi data inventaris, serta transparansi dalam pengelolaan aset organisasi.

#### 5) Kontrol Ketat Transaksi BMN

Dalam pengelolaan aset negara, penerapan kontrol yang ketat terhadap setiap transaksi menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran, pemanfaatan, maupun penghapusan barang harus melalui proses otorisasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Proses pembelian dan pengadaan aset diawasi secara langsung oleh pejabat yang berwenang guna memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan. Selain itu, setiap transaksi dicatat dan didokumentasikan dengan rinci agar mudah ditelusuri dalam proses pemeriksaan atau audit. Dengan adanya

mekanisme ini, potensi penyimpangan dapat diminimalkan dan tata kelola aset dapat terlaksana secara tertib dan efisien.

6) Akses Terkendali dan Peningkatan Akuntabilitas

Pengendalian akses merupakan Langkah penting dalam menjaga keamanan dan keandalan sistem pengelolaan aset maupun data organisasi. Setiap pegawai hanya diberikan hak akses sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk mencegah terjadinya akses tidak sah atau penyalahgunaan informasi. Selain itu, pengelolaan keuangan dan aset dilakukan secara transparan guna memastikan adanya akuntabilitas yang jelas di setiap tingkatan. Penerapan prinsip transparansi ini juga memudahkan proses pemantauan dan evaluasi oleh pihak yang berwenang, sehingga setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7) Dokumentasi yang Baik atas Sistem Pengendalian Intern serta Transaksi dan Kejadian Penting

dokumentasi yang memadai merupakan bagian penting dari sistem pengendalian internal yang efektif. Setiap transaksi dan aktivitas penting harus dicatat secara lengkap dan disertai bukti yang sah agar dapat diverifikasi dengan mudah, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Sistem dokumentasi yang teratur membantu menciptakan jejak audit yang jelas, sehingga seluruh proses pengelolaan aset dan kegiatan organisasi dapat dipantau serta dipertanggungjawabkan dengan baik. Selain itu, dokumentasi yang akurat juga mendukung transparansi, memperkuat

akuntabilitas pegawai, dan menjadi dasar dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban organisasi.

#### **D. Informasi dan Komunikasi**

Informasi dan komunikasi memegang peranan penting dalam mendukung efektivitas sistem pengendalian internal. Setiap pembaruan atau mengembangkan sistem informasi dilakukan untuk memastikan bahwa setiap tersebut mampu menunjang pelaksanaan tugas dan pengelolaan aset secara optimal. Proses pengembangan biasanya mengacu pada pedoman dan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak berwenang agar sistem yang digunakan tetap, relevan, andal, serta sesuai dengan kebutuhan organisasi. Melalui komunikasi yang jelas dan aliran informasi yang tepat, koordinasi antar bagian dapat berjalan lebih efisien dan mendukung pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

#### **E. Pemantauan dan Pengendalian Intern**

Pemantauan dan pengendalian intern dilakukan untuk memastikan seluruh aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan kebijakan serta prosedur yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan kegiatan rutin seperti *supervise*, pemeriksaan, rekonsiliasi data, serta tindakan korektif yang diperlukan guna menjaga aktivitas pengendalian internal. Selain pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan, evaluasi independen juga dilaksanakan untuk menilai sejauh mana sistem pengendalian internal berfungsi dengan baik. Penilaian kinerja pegawai dilakukan secara periodik sebagai bentuk evaluasi terhadap pencapaian target

dan tanggung jawab yang telah ditetapkan, sehingga hasilnya dapat menjadi dasar perbaikan dan peningkatan kinerja di masa mendatang.

#### **2.1.1.4 Pengukuran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, ukuran yang umum digunakan untuk menilai efektivitas pengendalian intern pemerintah adalah melalui lima unsur utama SPIP, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern.

Pandangan ini sejalan dengan Rahayu (2021) yang menyatakan bahwa kelima unsur tersebut dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan penerapan sistem pengendalian intern di instansi pemerintah daerah.

Adapun penjelasan masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

lingkungan pengendalian merupakan dasar yang memengaruhi kesadaran seluruh pegawai akan pentingnya pengendalian intern.

2. Penilaian Risiko

penilaian risiko adalah proses identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan organisasi.

3. Kegiatan Pengendalian

kegiatan pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen telah dilaksanakan secara efektif.

#### 4. Informasi dan Komunikasi

unsur ini mencakup proses penyediaan, pemrosesan, dan penyampaian informasi yang relevan serta andal antar unit organisasi.

#### 5. Pemantauan Pengendalian Intern

pemantauan merupakan kegiatan evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas sistem pengendalian intern, yang dapat dilakukan melalui audit internal atau penilaian mandiri.

### **2.1.2 E-Government**

#### **2.1.2.1 Definisi e-Government**

The World Bank (2015) mendefinisikan bahwa e-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh badan pemerintah, seperti: Wide Area Network, Internet, dan Mobile Computing yang mempunyai kemampuan untuk merubah hubungan dengan warga negara, pelaku bisnis, dan badan pemerintah lainya. e-government adalah bagaimana pemerintah bekerja secara efektif, melakukan penyebaran informasi dan melakukan pelayanan kepada Masyarakat secara baik (UNDPP, 2014). Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan Startegi Nasional Pengembangan E---government menjelaskan bahwa e-government merupakan Upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.

Menurut Aprianty (2016:109), *e-Government* merupakan sistem yang dirancang untuk mempercepat proses pengelolaan data serta penyediaan informasi yang akurat sehingga dapat meningkatkan efisien kinerja pemerintahan. Dengan

adanya sistem ini, pelayanan publik dapat dilakukan secara lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran.

Bao et al (2024:134), juga menjelaskan bahwa *e-Government* adalah penerapan teknologi berbasis internet oleh pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas program dan layanan publik. Melalui pemanfaatan teknologi ini, pemerintah dapat melakukan transformasi hubungan dengan masyarakat, sektor bisnis, serta berbagai lembaga publik lainnya dengan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Selain itu, Wirawan (2020:156) menyatakan bahwa *e-Government* ialah sistem teknologi informasi yang di kembangkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Menurut Sigit Sugiarto (2024:116), *e-Government* yaitu bentuk kebijakan baru yang menunjukkan adanya kesadaran pemerintah dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan demikian, *e-Government* ialah wujud inovasi pemerintah dalam meningkatkan efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas pelayanan kepada publik di era digital saat ini.

#### **2.1.2.2 Tujuan *e-Government***

Menurut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008 tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, pengembangan *e-Government* di

Indonesia memiliki empat tujuan utama, yang saling terkait untuk membangun tata Kelola pemerintahan yang modern dan responsif.

1. Membangun jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas, merata dan terjangkau

Tujuan pertama ini menekankan pentingnya akses masyarakat terhadap layanan publik secara mudah dan cepat melalui teknologi informasi. Dengan adanya *e-Government*, masyarakat tidak lagi harus datang langsung ke kantor pemerintahan untuk urusan administrasi, karena layanan bisa diakses secara *Online*. Hal ini mencakup:

- Kualitas: Layanan harus cepat, akurat dan handal.
- Keterjangkauan: Layanan data diakses tanpa biaya berlebihan bagi Masyarakat.
- Pemerataan: Semua lapisan Masyarakat di berbagai daerah, dapat menikmati layanan yang sama.

2. Membangun hubungan interaktif antara pemerintah dan dunia usaha

*E-Government* juga bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan sektor swasta, sehingga tercipta lingkungan usaha yang lebih kompetitif. Dengan sistem yang terkomputerisasi dan terintegrasi, proses perizinan dan administrasi bisnis menjadi lebih cepat dan transparan.

Hal ini membantu pengusaha untuk melakukan kegiatan bisnis tanpa hambatan birokrasi yang Panjang. Secara tidak langsung, hal ini meningkatkan kegiatan daya asing ekonomi nasional, karena investasi dan kegiatan ekonomi lebih lancar.

3. Menciptakan mekanisme komunikasi publik yang transparan dan partisipasi

Salah satu nilai penting *e-Government* adalah membuka ruang bagi Masyarakat untuk ikut serta dalam proses pengambilan Keputusan pemerintah. Transparansi ini memungkinkan publik mengetahui kebijakan, anggaran, dan program pemerintah secara jelas lalu, masyarakat bisa memberikan masukan atau kritik melalui saluran digital dan pemerintah dapat merespons aspirasi warga dengan lebih cepat, sehingga kebijakan yang dibuat lebih sesuai kebutuhan masyarakat.

4. Meningkatkan efisien dan integrasi proses kerja pemerintahan

Tujuan terakhir fokus pada sistem internal pemerintah agar tata kelola administrasi efisien dan ter koordinasikan dengan baik di semua tingkatan, baik pusat maupun daerah. Dengan integrasi data antar instansi, pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, tepat, dan berbasis data akurat. Efisiensi ini Mengurangi prosedur yang berbelit dan tumpang tindih.

Integrasi ini Data dan informasi antar lembaga dapat saling terhubung, sehingga koordinasi menjadi lebih mudah

Secara keseluruhan, keempat tujuan ini menggambarkan visi *e-Government* sebagai alat transformasi pemerintahan. Bukan sekedar menggunakan teknologi, tetapi juga memperbaiki cara pemerintah bekerja, memperkuat partisipasi masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan penerapan yang tepat, *e-Government* dapat menjadikan pemerintahan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel, sekaligus menghadirkan layanan publik yang lebih dekat dengan masyarakat.

### 2.1.2.3 Komponen *e-Government*

Dalam perkembangan era digital saat ini, penerapan *e-Government* menjadi langkah strategis yang krusial bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan efisien pelayanan publik, transparansi, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2025), implementasi *e-Government* bukan hanya terbatas pada pemanfaatan teknologi informasi semata saja, melainkan juga mencakup penataan struktur organisasi, penyusunan regulasi yang mendukung, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan secara terpadu. Oleh karena itu, untuk mewujudkan implementasi *e-Government* yang efektif, diperlukan beberapa komponen utama yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain.

Adapun komponen-komponen dalam *e-Government* tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepemimpinan Eksekutif (*Executive Leadership*)

Kepemimpinan eksekutif ini memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan penerapan *e-Government*. Kepala pemerintah berfungsi sebagai pengarah utama yang menentukan visi, misi, tujuan strategis, serta standar teknologi informasi yang akan diterapkan di seluruh instansi pemerintah. Dalam konteks ini, kepala pemerintah bertindak layaknya *Chief Executive Officer (CEO)* yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh kebijakan digital berjalan selaras dengan arah pembangunan nasional. Sebagian kewenangan tersebut biasanya didelegasikan kepada pejabat teknis seperti *Chief Information Officer (CIO)* guna mengelola dan mengawasi

pelaksanaan program *e-Government* secara operasional. Kepemimpinan yang kuat, visioner, dan konsisten menjadi faktor kunci agar implementasi *e-Government* dapat berlangsung efektif dan mendukung transformasi digital pemerintah secara berkelanjutan.

## 2. Keikutsertaan Otoritas Legislatif dan Instansi Terkait

Peran otoritas legislative dan instansi pemerintah lainnya sangat penting dalam mendukung keberhasilan implementasinya *e-Government*. Lembaga legislative berfungsi sebagai mitra pengawas dan pembentuk arah kebijakan, yang memastikan bahwa setiap program digital pemerintah dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip tata kelola yang baik. Keterlibatan mereka juga berkontribusi dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta legitimasi kebijakan publik yang dihasilkan. Melalui kolaborasi yang sinergis antara lembaga eksekutif, legislative, dan instansi terkait, implementasi *e-Government* dapat berjalan lebih efektif, terarah dan berkesinambungan dalam mendukung transformasi digital pemerintah.

## 3. Penasihat Teknologi Informasi (*IT Advisor*)

Penasihat Teknologi Informasi memiliki peran penting sebagai pusat pemikiran strategis dalam pengembangan sistem *e-Government*. Lembaga ini berfungsi memberikan rekomendasi kebijakan, arahan teknis, serta analisis terhadap perkembangan teknologi informasi yang relevan bagi kebutuhan pemerintahan. Melalui peranya, penasihat IT membantu memastikan bahwa setiap inovasi dan pembaruan sistem digital yang di terapkan di berbagai instansi pemerintah tetap efisien dan sesuai dengan tujuan strategis

organisasi. Dengan demikian, keberadaan IT Advisor berkontribusi dalam menjaga agar implementasi *e-Government* selalu adaptif terhadap dinamika teknologi dan kebutuhan pelayanan publik.

4. Pengelola Tingkat Lembaga/Organisasi (*Enterprise Level Overnance Boards*)

Pada tingkat lembaga atau organisasi, pengelola memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola investasi yang berkaitan dengan aplikasi dan infrastruktur teknologi informasi. Mereka berperan memastikan bahwa pelaksanaan *e-Government* di masing-masing unit kerja berjalan selaras dengan kebijakan dan standar nasional, serta mendukung pencapaian tujuan pemerintahan yang berorientasi pada efisien, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik. Melalui tata kelola yang baik di tingkat lembaga, implementasi *e-Government* dapat berlangsung secara terarah dan terkoordinasikan, serta memperkuat sinergi antar instansi pemerintah.

5. Pengawas dan Pengendalian Teknis (*Technical Oversight Boards*)

Pengawasan dan pengendalian teknis memiliki peran sentral dalam memantau dan memastikan kelancaran operasional sistem *e-Government*. Tugas utama lembaga ini meliputi pengawasan terhadap kesiapan infrastruktur jaringan, keandalan peneraan sistem aplikasi, serta konsistensi penerapan standar teknis di berbagai instansi pemerintah. Melalui fungsi pengawasan yang efektif, potensi gangguan teknis yang dapat diminimalkan. Dengan demikian, keberadaan pengawas teknis menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan kualitas layanan digital agar implementasi *e-Government* berjalan optimal dan berkesinambungan.

6. Masyarakat (*CRM Cositituent Group*)

Masyarakat memiliki peran penting sebagai pengguna sekaligus pengawas layanan publik digital dalam pelaksanaan *e-Government*. Melalui partisipasi aktif berupa masukan, kritik, maupun saran, masyarakat dapat membantu pemerintah dalam mengevaluasi dan memperbaiki kualitas layanan yang diberikan. Keterlibatan publik ini tidak hanya meningkatkan responsibilitas dan relevansi layanan digital terhadap kebutuhan pengguna, tetapi juga memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik. Dengan demikian, partisipasi masyarakat menjadi elemen kunci dalam mewujudkan *e-Government* yang inklusif dan berorientasi pada kepuasan publik.

7. Kalangan Swasta (*private Sector Advisor*)

Sektor swasta berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam pengembangan dan penerapan teknologi pada sistem *e-Government*. Melalui kerja sama dengan pihak swasta, pemerintah dapat memperoleh inovasi, keahlian teknis, serta akses terhadap teknologi terkini yang mendukung peningkatan efisien operasional dan kualitas layanan publik. Kolaborasi ini juga berkontribusi terhadap keberlanjutan program *e-Government*, karena memungkinkan adanya transfer pengetahuan dan penguatan kapasitas teknologi di lingkungan pemerintahan. Dengan demikian, keterlibatan sektor swasta menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong terciptanya tata Kelola pemerintah digital yang efektif, modern, dan berdaya saing tinggi.

Secara keseluruhan, keberhasilan penerapan *e-Government* pada sinergi seluruh komponen yang terlibat, mulai dari kepemimpinan eksekutif, lembaga legislative, penasihat teknologi, hingga partisipasi masyarakat dan sektor swasta. Setiap unsur memiliki peran saling melengkapi dalam menciptakan tata Kelola pemerintahan berbasis digital yang efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan koordinasi yang baik antara seluruh komponen tersebut, implementasi *e-Government* diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayan publik dan akuntabilitas keuangan daerah.

#### **2.1.2.4 Pengukuran *e-Government***

Surat Edaran Menteri Kominfo Nomor 07/SE/M.KOMINFO/10/2011 menjelaskan bahwa e-government dapat dinilai melalui lima indikator utama yang menggambarkan bagaimana teknologi informasi diterapkan dalam pelayanan dan pengelolaan pemerintahan. pemanfaatan teknologi informasi merupakan upaya pemerintah dalam menggunakan sistem digital seperti aplikasi keuangan, sistem informasi manajemen daerah, atau portal pelayan publik untuk meningkatkan efektivitas kerja aparatur dan mempercepat pelayanan publik.

##### **1. Dimensi Kebijakan**

Dimensi ini menilai seberapa kuat landasan kebijakan pemerintah dalam menerapkan e-government. Tanpa kebijakan yang jelas, implementasi teknologi biasanya berjalan setengah-setengah dan tidak terarah.

##### **2. Dimensi Kelembagaan**

Dimensi ini menilai kesiapan organisasi pemerintah dalam mengelola sistem elektronik. Lembaga yang kuat akan memiliki struktur kerja dan sumber daya yang mendukung keberlanjutan layanan digital.

### 3. Dimensi Infrastruktur

Dimensi ini berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana teknologi yang menjadi dasar berjalannya layanan elektronik.

## **2.1.3 Akuntabilitas Keuangan**

### **2.1.3.1 Definisi Akuntabilitas Keuangan**

Menurut mardiasmo (2018:26), Akuntabilitas keuangan adalah tugas pemerintah untuk memberikan jawaban, menyajikan, melaporkan, dan menjelaskan semua kegiatan serta penggunaan dana yang ada kepada orang-orang yang berhak mengetahui hal tersebut. Secara sederhana, pemerintah wajib membuktikan bahwa uang negara digunakan secara hemat, tepat, hasilnya baik, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selanjutnya Etty Gurendrawati, (2024:185), menjelaskan Akuntabilitas keuangan adalah cara pemerintah menanggung jawaban dengan memberikan informasi tentang transaksi keuangan secara jelas kepada lembaga peradilan, legislatif, pemerintahan, serta masyarakat agar penggunaan dana publik dapat diawasi dan dinilai.

Rantepulung et al (2023:76) juga menegaskan bahwa akuntabilitas keuangan merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk melaporkan segala kegiatan yang telah dilakukan. Sementara itu, Kusmaeni & Syahrenny (2024:98) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyelenggaraan kegiatan publik untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap langkah,

keputusan, serta hasil kinerja yang dilakukan kepada pihak yang berwenang maupun kepada masyarakat.

Dengan demikian, akuntabilitas merupakan sarana penting bagi organisasi untuk menunjukkan kinerja, kejujuran, dan komitmen dalam menjalankan amanah publik secara profesional dan transparan.

### **2.1.3.2 Tujuan Akuntabilitas Keuangan**

Wahyudi et al (2021:76) menjelaskan bahwa tujuan utama dari akuntabilitas keuangan adalah untuk memastikan terjaminnya integrasi, keterbukaan, serta kepatuhan terhadap seluruh ketentuan yang mengatur pengelolaan keuangan negara. Akuntabilitas keuangan menuntut agar setiap instansi pemerintah mampu mengelola dana publik secara jujur dan bertanggung jawab, dengan tetap mematuhi prinsip transparansi dalam setiap tahap pengelolaan keuangan.

Evada Dewata (2021:110), dalam penelitiannya mengenal akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menjelaskan bahwa akuntabilitas keuangan memiliki sejumlah tujuan strategis yang berperan penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. Tujuan-tujuan tersebut mencakup beberapa aspek utama sebagai berikut:

1. Menjamin bahwa setiap pengeluaran daerah sesuai dengan prioritas Pembangunan.

Setiap alokasi anggaran harus diarahkan untuk mendukung program dan kegiatan yang memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya akuntabilitas, penggunaan dana publik dapat

diawasi agar tetap konsisten dengan rencana pembangunan daerah dan tidak menyimpang dari sasaran yang telah ditetapkan.

2. Menunjukkan komitmen pemerintah terhadap efisien penggunaan sumber daya publik.

Pemerintah daerah dituntut untuk memanfaatkan setiap sumber daya secara optimal, sehingga tidak terjadi pemborosan, tumpang tindih program, atau penggunaan dana yang tidak produktif. Akuntabilitas keuangan dalam hal ini berfungsi memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

3. Memberikan dasar bagi evaluasi kinerja keuangan daerah secara objektif.

Melalui penerapan akuntabilitas, hasil pengelolaan keuangan dapat dievaluasi secara terukur berdasarkan indikator yang jelas. Evaluasi tersebut menjadi alat bagi masyarakat dan lembaga pengawasan untuk menilai efektivitas serta efisien pengelolaan keuangan daerah.

Dengan demikian, akuntabilitas keuangan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif, tetapi juga sebagai strategi penting dalam mewujudkan pemerintah daerah yang transparan, efisien, dan berorientasi.

### **2.1.3.3 Komponen Akuntabilitas Keuangan**

Menurut Hasyim & Ilham (2025), terdapat tiga komponen utama dalam akuntabilitas keuangan, yaitu sebagai berikut:

1. Integrasi keuangan

Mencerminkan kejujuran dan ketepatan dalam penyajian informasi keuangan.

Integritas ini menuntut agar setiap laporan keuangan mampu menggambarkan

kondisi keuangan, transaksi, serta peristiwa ekonomi secara wajar tanpa adanya manipulasi atau penyimpangan. Dengan menjaga integritas, laporan keuangan data menjadi sumber informasi di percaya dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat.

## 2. Pengungkapan (*disclosure*)

Merupakan kewajiban bagi entitas pemerintah untuk menyajikan laporan keuangan yang mencerminkan kondisi ekonomi dan keuangan secara lengkap serta informatif. Pengungkapan yang memadai menjadi bentuk transparansi publik yang memungkinkan masyarakat menilai kinerja keuangan pemerintah. Semakin terbuka laporan keuangan disajikan, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara atau daerah.

## 3. Ketaatan terhadap peraturan

Untuk memastikan bahwa seluruh proses akuntansi dan pelaporan keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum, standar akuntansi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan ini penting untuk menjamin bahwa pengelolaan keuangan publik berjalan dalam koridor hukum dan menghindari terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran.

Ketiga komponen tersebut saling berkaitan dan menjadi fondasi utama bagi

### **2.1.3.4 Pengukuran Akuntabilitas Keuangan**

Menurut Rizky Gunawan Dimas (2016:115), menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. penelitian (Sigit Sugiarto, 2024:119) juga menyatakan bahwa

transparansi dan ketaatan terhadap peraturan merupakan komponen penting dalam membentuk akuntabilitas keuangan yang tinggi.

Adapun penjelasan setiap indikator adalah sebagai berikut:

1. Transparansi Laporan Keuangan

Transparansi laporan keuangan berarti keterbukaan pemerintah dalam menyajikan informasi keuangan kepada publik. Transparansi dapat diukur dari sejauh mana laporan keuangan mudah diakses, dipahami, dan dipublikasikan secara terbuka.

2. Keandalan dan Ketepatan Laporan

Laporan keuangan yang andal harus disusun sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan disajikan tepat waktu. Keandalan ini menunjukkan kualitas informasi keuangan yang jujur dan bebas dari kesalahan material.

3. Ketaatan pada Peraturan

Ketaatan pada peraturan diukur melalui kepatuhan instansi terhadap kebijakan, pedoman, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan. Kepatuhan yang tinggi akan mencegah penyimpangan dan meningkatkan akuntabilitas.

#### 4. Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan

Tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah adalah kewajiban aparatur pemerintah untuk melakukan pekerjaan sesuai prinsip efisien, efektivitas dan mengikuti peraturan perundang-undangan. Artinya setiap penggunaan dana harus bisa dipertanggung jawabkan, baik dari segi tata kelola administrasi maupun hasil yang di capai.

#### 2.1.4 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2. 1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Hasil Penelitian Penulis**

No	Penulis,Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber Referensi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Priscilla et al (2022) Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal dan Penerapan Good Governance terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	- Variabel X = SPIP - Kuesioner	- menambahkan variabel <i>sistem</i> , .	Sistem akuntansi, akses laporan, pengendalian internal, dan good governance meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah.	Jurnal ilmiah akuntansi, Vol.6, No. 2
2.	Sanjaya et al (2025) Penerapan E-Budgeting untuk Mendukung Transparansi Anggaran (Studi Kasus: Pemerintah Kota Surakarta)	- membahas penerapan teknologi	- literatur pendekatan kuantitatif	Penerapan e-Budgeting di Kota Surakarta meningkatkan efisiensi, transparansi anggaran, dan partisipasi masyarakat publik.	ANTASENA: Governance and Innovation Journal, Vol. 3 No. 1

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Iriyani & Mutmainah (2024) Sistem Pengendalian Internal Sebagai Pemoderasi Pengaruh Integrasi e-Planning dan e-Budgeting Terhadap Pencegahan Korupsi	- variabel X= SPIP dan e-Government	- variabel terikat memakai moderasi	Integrasi e-planning dan e-budgeting membantu mencegah korupsi, namun lemahnya SPIP mengurangi efektivitasnya.	Jurnal Akuntansi, Vol. 34, No. 1
4.	Yogasworo & Suprayitno (2020) Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi SDM, Teknologi Informasi, dan Peran Pengelolaan Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	- variabel X= SPIP dan teknologi informasi	- kualitas laporan akuntabilitas laporan keuangan	Seluruh variabel SAP, SPIP, kompetensi SDM, teknologi informasi, dan peran PPK-OPD berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.	Jurnal Equity Sistem Pengendalian Internal, Vol.22 No.3
5.	Nita Arbi & Suprayitno (2019) Sistem Pengendalian Internal dan Kualitas Informasi pada Sistem Informasi Keuangan Daerah	- variabel X= SPIP teknologi informasi	- metode kualitatif deskriptif kuantitatif	SPI dalam penyelenggaraan SIKD dinilai cukup efektif, namun pengendalian aplikasi masih lemah dan informasi belum akurat.	Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik, Vol. 11.
6.	Jaya & Yamin (2025) Pengaruh Penerapan E-Government,	- meneliti e-government	- menambahkan variabel kepercayaan	E-Government dan transparansi	Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Vol. 8, No. 5

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat			signifikan terhadap kepercayaan masyarakat, sedangkan akuntabilitas tidak signifikan.	
7.	Sigit Sugiarto (2024) Sistem Pengendalian Internal dalam Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah	- variabel X= SPIP metode kuantitatif	- provinsi sulawesi selatan	SPIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan serta meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah.	Insan Cita Bongaya Research Journal, Vol. 3 No. 2
8.	Suharti & Tini Rumsari (2021) Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa	- variabel X = SPIP terhadap Akuntabilitas keuangan	- variabel kopetensi - variabel e- government	SPI berpengaruh signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas pemerintah desa.	Jurnal Competitive, Vol. 16, No. 2
9.	Risya Nurindahsari & Rendra Trisyanto (2022) Pengaruh Penerapan Sistem Informasi E- Government terhadap Transparansi dan Akuntabilitas	- pengeruh e- government terhadap akuntabilitas keuangan	- fokus pada bandung	Penerapan e- Government berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah, namun	Indonesian Accounting Research Journal, Vol. 2 No. 4

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pengelolaan Keuangan Daerah				tidak signifikan terhadap transparansi.
10.	Hasyim & Ilham (2025), Government untuk Transparansi Laporan Keuangan di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro	- meneliti e- government	- pendekatan kualitatif - lokasi	Implementasi e- government di Kecamatan Metro Pusat meningkatkan transparansi, efisiensi administrasi, dan partisipasi masyarakat.	Jurnal Penelitian Inovatif, Vol. 5, No.2
11.	Iswanda Sulastri, Abdul Wahid Mahsuni, & Siti Aminah Anwar (2025) Pengaruh E- Government Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik di Pemerintahan Daerah (Studi Kecamatan Wawo NTB Bima)	- variabel X e- government	- metode kuantitatif sederhana	E-Government berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan publik.	e-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, Vol. 14, No. 1
12.	Fatimah Elkha & Wahidahwati (2020) Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	- membahas SPP	- variabel dependen kinerja - akuntabilitas keuangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal, akuntabilitas, dan transparansi berpengaruh positif dan	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 9, No. 3

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<i>terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada OPD Kabupaten Gresik)</i>				signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.
13.	Kartika Dewi Anggraini & Nyimas Wardatul Afiqoh (2024) Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pengendalian Intern, dan Transparansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	- sama manenliti SPIP	- menambah variabel sistem akuntansi	Sistem akuntansi dan transparansi berpengaruh signifikan, sementara pengendalian intern hanya berpengaruh secara simultan.	Journal of Economic, Business and Accounting, Vol. 7, No. 2
14.	Tias Monika Ferlia, Supami Wahyu Setyowati, Ati Retnasari, & Mochamad Fariz Irianto (2023) <i>Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada BKAD Kabupaten Malang)</i>	- variabel X= SPIP	- dependen variabel kualitas keuangan daerah - akuntabilitas keuangan	Akuntabilitas dan SPIP berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan transparansi tidak.	Jurnal Akuntansi Neraca, Vol. 1, No. 2
15.	Arin Pranesti (2022) Kajian Sistem Penganggaran Partisipatif	- meneliti e- government	- pendekatan kualitatif - kuantitatif	Penerapan e- government meningkatkan akuntabilitas keuangan	

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pemerintah Daerah Melalui E- Government Sebagai Wujud Good Governance				dan transparansi melalui penganggaran partisipatif.
16.	Priscilia Grace Bay & Maria Elerina Douk Tunti (2019) Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang)	- variabel X= SPIP	- menambah variabel kompetensi SDM	SPIP berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah, sedangkan kompetensi SDM tidak.	Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas, Vol. 7, No. 2
17.	Muhammad Fadil Asri, Ratna Ayu Damayanti, & Nirwana (2023) Dampak Implementasi Standar Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Akuntabilitas Keuangan.	- variabel X= SIPI terhadap akuntabilitas keuangan	- menambah variabel standar Akuntansi	Implementasi SAP dan SPIP berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah.	Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban, Vol.9, No. 1
18.	Dika Jaya Apriani, Irwansyah, & Baihaqi (2013) Analisis Implementasi Sistem Pengendalian Intern)	- variabel X = SPIP - PP no 60 tahun 2008	- Lokasi bengkulu - tasikmakaya	Penilaian risiko, informasi dan komunikasi, serta pemantauan	Jurnal Fairness, Vol. 3, No. 3

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pemerintah dan Pengaruhnya terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Bengkulu)			SPIP berpengaruh signifikan, sedangkan lingkungan dan aktivitas pengendalian tidak.	
19.	Wiwi Idawati & Lia Eleonora (2019) Penerapan Sistem Pengendalian Intern dan Akuntabilitas Keuangan dalam Mewujudkan Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Pemerintah Kota Bekasi)	- variabel X = SPIP terhadap akuntabilitas keuangan	- variabel dependen kualitas laporan keuangan - akuntabilitas keuangan	SPI dan akuntabilitas keuangan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.	Penerapan Sistem Pengendalian Intern journal, Vol. 22, No. 2
20.	Evada Dewata, Hadi Jauhari, & Misfi El Auda (2021) Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	- variabel X= SPIP terhadap akuntabilitas keuangan	- menambahkan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dan Kualitas Laporan Keuangan sebagai variabel mediasi.	SPIP dan SAPD berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah, baik langsung maupun melalui kualitas laporan keuangan.	Jurnal Riset Terapan Akuntansi, Vol. 5, No. 2

### 2.1.5 Hasil Penelitian

**Tabel 2. 2**  
**Hasil Penelitian Penulis**

No.	Penulis	Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Pingkan Triasih Anggraeni	2025	Pengaruh Pengendalian Internal Pemerintah dan <i>e-Government</i> Terhadap Akuntabilitas Keuangan (survei pada SKPD Kota Tasikmalaya)	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah ( $X_1$ ) <i>e-Government</i> ( $X_2$ ) Akuntabilitas Keuangan (Y)	Kuantitatif (survei)	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan E-Government berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Keuangan pada SKPD Kota Tasikmalaya dengan nilai Adjusted R Square sebesar 0,636

### 2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Mardiasmo (2018:111), akuntabilitas merupakan tugas yang harus dilakukan oleh setiap orang atau lembaga untuk menjelaskan apakah tugas atau misi organisasi berhasil atau tidak, agar tujuan yang telah ditentukan bisa tercapai. Dalam pemerintahan, akuntabilitas tidak hanya tentang mengirimkan laporan hasil kerja, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab moral dan etika terhadap masyarakat yang menjadi pemilik kepentingan utama.

Wantah et al (2020:116), juga menegaskan akuntabilitas merupakan bentuk bagian penting dari prinsip *Good Governance*, karena melalui akuntabilitas tercipta

sistem pemerintahan yang jujur, efisien, dan memperhatikan kepentingan masyarakat. Prinsip ini meminta proses penyusunan, pelaksanaan, pelaporan anggaran dilakukan secara terbuka agar masyarakat bisa menilai apakah pemerintah bekerja dengan baik dan sesuai aturan hukum. Akuntabilitas dalam pemerintahan juga bertindak sebagai cara untuk mengendalikan kekuasaan publik, di mana masyarakat berhak untuk mengetahui, menilai dan bahkan memberikan kritik terhadap kinerja pejabat pemerintah.

Dengan menerapkan akuntabilitas yang baik, pemerintah daerah dapat membuat pengelolaan keuangan yang transparan dan mampu merespon kebutuhan yang bersih dan dapat dipercaya, sehingga setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpijak pada kepentingan Masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya kepentingan individual atau kelompok tertentu.

Penelitian Fitriani (2020) menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas keuangan menjadi lebih baik ketika sistem pengendalian intern diterapkan dengan baik dan teknologi informasi dalam pemerintahan digunakan secara efektif. Dengan demikian, akuntabilitas keuangan menjadi salah satu ukuran penting dalam mengevaluasi bagaimana pemerintah daerah mengelola keuangannya. Indikator akuntabilitas ini mencakup transparansi, tanggung jawab, kejujuran, keadilan, dan patuh kepada peraturan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang terus dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Proses ini merupakan bagian dari setiap tindakan dan kegiatan yang dilakukan, bertujuan memberikan keyakinan yang cukup bahwa pemerintah

mencapai efektivitas dan efisien, keandalan dalam pelaporan keuangan, perlindungan aset negara, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.

Mardiosmo (2018:), juga menegaskan bahwa pengendalian intern yang baik dalam pemerintahan dapat menciptakan tata kelola keuangan yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem pengendalian intern ini membantu memastikan semua transaksi keuangan tercatat dengan benar, dilaporkan secara jujur, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan teori *Good Governance*, di mana pengendalian intern menjadi dasar dalam menciptakan keadilan dan tanggung jawab publik dalam pengelolaan keuangan negara.

Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa SPIP memberikan dampak positif pada akuntabilitas keuangan. Putri dan Nugraha (2020:89) menemukan bahwa penggunaan SPIP berdampak signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Rahmawati (2020:76) juga menjelaskan bahwa komponen pengendalian intern seperti lingkungan pengendalian dan pemantauan mampu mencegah penyimpangan keuangan serta meningkatkan keandalan laporan keuangan. Suryanto (2021:59) juga menegaskan bahwa SPIP yang efektif dapat membantu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

dalam indikator utamanya yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan, SPIP berperan penting dalam mencegah penyimpangan dan memastikan pengelolaan keuangan yang transparan serta akuntabel. Berdasarkan beberapa penelitian

sebelumnya, terlihat bahwa penerapan SPIP yang efektif dapat meningkatkan tingkat akuntabilitas keuangan daerah Putri & Nugraha, (2020:45).

Selain pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah. Seiring dengan perkembangan teknologi dan tuntutan transparansi publik, pemerintah dituntut untuk mengadopsi sistem digital dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut *World Bank* tahun 2016, *e-government* merupakan bentuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh lembaga pemerintah untuk membuat pelayanan pemerintah lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan menerapkan *e-government*, masyarakat bisa mendapatkan informasi publik secara lebih mudah dan terbuka, serta memperkuat sistem pelaporan keuangan yang bisa diawasi oleh masyarakat secara langsung.

Risya Nurindah dan Renra Trisyanto, menegaskan bahwa *E-Government* sebuah aplikasi teknologi informasi yang berbasis digital, menggunakan internet dan dapat diakses melalui perangkat komputer atau aplikasi lainnya. Pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah, untuk menyampaikan seluruh informasi yang di perlukan dari pemerintah kepada berbagai pengguna seperti masyarakat luas, perusahaan, badan usaha terkait, pegawai pemerintah, serta lembaga lainnya, secara online melalui *website* pemerintah daerah.

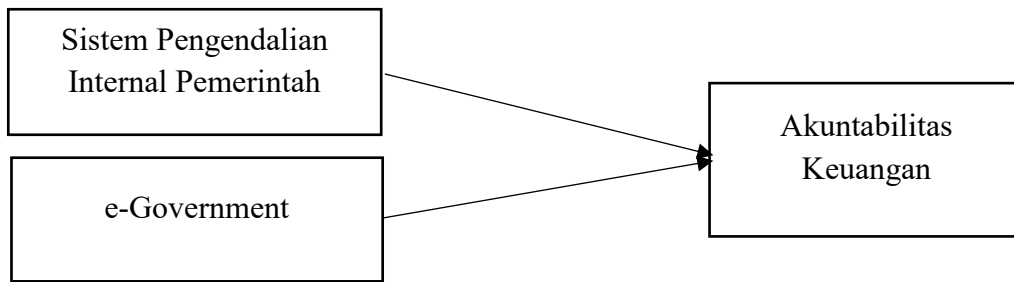
Penelitian Fitriani (2020:89) menunjukkan bahwa penerapan *e-government* berdampak positif pada transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Susanto dan yuliani (2019:77) juga menemukan bahwa sistem informasi keuangan daerah yang elektronik dapat meningkatkan efisien dalam pelaporan dan mencegah

penyimpangan anggaran. Sementara itu, Prasetyo (2021:132) menyatakan bahwa penerapan *e-government* membantu memperkuat tanggung jawab para aparatur dalam mengurus dan menyajikan laporan keuangan secara tepat serta mudah diakses oleh publik. Dengan demikian, penerapan *e-government* yang baik bisa memperkuat prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan daerah.

Dalam implementasinya, *e-government* tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi semata, tetapi juga mencakup berbagai aspek pendukung yang saling terintegrasi. Melalui beberapa indikator seperti Dimensi Kebijakan, Dimensi Kelembagaan, Dimensi Aplikasi, Dimensi Perencanaan. *e-government* mendorong terciptanya transparansi dan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah Fitriani (2021:76).

Berdasarkan penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa semakin baik penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan *e-Gvernment*, maka tingkat Akuntabilitas Keuangan di pemerintah daerah semakin baik pula. Dalam konteks SKPD Kota Tasikmalaya, diharapkan penerapan SPIP dan *e-government* bisa memperkuat pengelolaan keuangan daerah agar lebih efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

berdasarkan uraian di atas maka dapat dibuat bagan kerangka pemikiran sebagai berikut.



**Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran**

### **2.3 Hipotesis**

Menurut Sugiyono (2018) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori dan belum menggunakan fakta. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

1.  $H_1$  : Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh Positif terhadap Akuntabilitas keuangan
2.  $H_2$  : *e-Government* berpengaruh Positif terhadap Akuntabilitas Keuangan